



**KECAMATAN KINTAP
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN KINTAP TAHUN 2022	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2022 dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kintap	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Kintap	26
3.3. Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V PENUTUP	42

Lampiran :

1. Evaluasi Serapan SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2022
2. Capaian Renstra 2019-2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah, maka akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kintap Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan bagian dari Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan 3 (tiga) isu strategis dalam penyusunan RPD 2024-2026, yaitu 3 (Tiga) Isu strategis, Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat secara merata dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Rencana Kerja ini disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD 2024 -2026. Tujuan yang akan dicapai Kantor Kecamatan Kintap yaitu Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah. Sedangkan Sasaran nya adalah Meningkatnya kinerja tata kelola kecamatan kintap yang akuntabel dan Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Kintap.

Semoga dengan disusunnya rencana kerja ini, Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan kemudahan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan selalu memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kintap, 24 Januari 2023

Camat Kintap,

Sutarno, S.Kep.Ns, MM
NIP. 19731006 199602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, RPD SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KU/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA-SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen

perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kintap tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi untuk kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kintap tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kintap tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 16. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
 21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kintap tahun 2024 adalah untuk memberikan arah yang jelas untuk program kerja tahunan berupa penentuan Program dan Kegiatan SKPD dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan tujuannya adalah memudahkan dalam evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD. Kemudian berdasarkan Renja-SKPD Kecamatan Kintap inilah nantinya akan diformulasikan ke dalam APBD Kabupaten Tanah Laut melalui mekanisme yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Renja dimaksud.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Kintap tahun 2024 dibuat sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan
Berisi uraian tentang Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan. |
| Bab II | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja kantor Kecamatan Kintap Tahun 2022 Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja kantor kecamatan Kintap tahun lalu dan capaian renstra kantor kecamatan Kintap, analisis kinerja pelayanan kantor kecamatan Kintap, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor kecamatan Kintap, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. |
| Bab III | Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja kantor kecamatan Kintap. |
| Bab IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisi tentang Uraian Rencana Kerja Kecamatan Kintap Tahun 2024 |
| Bab V | Penutup |

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN KINTAP TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Kintap.

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kintap tahun anggaran 2022 seperti yang ditetapkan dalam APBD tahun 2021 terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Dalam dokumen Renja Perubahan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2022, SKPD Kecamatan Kintap melaksanakan 4 (Empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (Delapan belas) Sub Kegiatan dengan rincian hasil capaian kerja sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target / Realisasi	APBD Perubahan	Serapan	Persentase
Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Kantor Kecamatan Kintap yang tertib, efektif dan Efisien (Nilai SAKIP)							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok / 7 Dok	Rp 3.774.000,00	Rp 1.769.900	46,90%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap / 4Lap	Rp 5.114.000,00	Rp 3.175.000	62,08%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	11 Orang /Bulan	Rp 2.365.458.270	Rp 1.785.506.551	75,48%

		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19 Dok/ 19Dok	Rp 5.264.000,00	Rp 4.764.000	90,50%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 paket/ 2Paket	Rp 7.972.662,00	Rp 4.980.000	62,46%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket/ 2Paket	Rp 49.198.917,00	Rp 46.030.305	93,56%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket/ 7Paket	Rp 4.650.136,00	Rp 2.665.000	57,31%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520 Laporan	Rp 69.700.000,00	Rp 65.132.675	93,45%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 Unit/ 4 Unir	Rp 25.609.721,00	Rp 24.400.000	95,28%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan / 12 Laporan	Rp 44.608.935,00	Rp 38.408.407	86,10%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan / 12 Laporan	Rp 241.365.960,00	Rp 218.836.074	90,67%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit / 1Unit	Rp 11.000.000,00	Rp 10.304.000	93,67%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit/ 5Unit	Rp 55.000.000,00	Rp 54.810.811	99,66%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	17 Unit/ 14Unit	Rp 13.684.200,00	Rp 8.935.000	65,29%
Sasaran 2 :Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (IKM)							
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Laporan / 12 Laporan	Rp 14.996.200,00	Rp 4.216.000	28,11%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara reublik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	11 Orang / 3 Orang	Rp 17.000.000,00	17000000	100,00 %
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	2000 orang / 2000 Orang	Rp 1.029.992.634,00	Rp 879.587.800	85,40%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 Dok / 2 Dok	Rp 600.000	600000	100,00 %
					Rp 3.968.244.635	Rp 3.171.121.523	79,91%

Pada Tahun 2022, dengan keterbatasan Anggaran yang diberikan ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak dimasukkan dalam rencana belanja SKPD kecamatan Kintap.

Dari Hasil evaluasi Kinerja Tahun 2022, ada beberapa kendala , masukan dan saran untuk perbaikan sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Kendala Yang dihadapi	Masukan dan Saran untuk perbaikan	Capaian Kinerja
			Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4			
1	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	14 Desa	3 Desa	4 Desa	3 Desa	1 Desa	Ego Aparatur Pemerintahan Desa Tinggi, sering merasa tahu apabila diberi masukan dari pihak lain	Evaluasi Penempatan Aparatur desa dan pembinaan dan bimbingan rutin untuk aparatur desa (Desa salaman, Muara kintap dan Sungai Cuka)	11 Desa
2	Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	4 Desa	4 Desa				Dengan adanya perubahan sistem pembagian wilayah (Dusun) dan keterwakilan perempuan sudah mengalami peningkatan perbaikan dibandingkan pemilihan sebelumnya (Penunjukan)	Pertahankan sistem penjarangan yang sdh ada	4 Desa
3	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	14 Desa	3 Desa	4 Desa	3 Desa	2 Desa		Desa Muara Kintap dan Desa Salaman kurang akurat dan lambat dalam verifikasi data	12 Desa
4	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 kali			1 Kali		Tidak ada		

Dari Hasil Evaluasi Seksi Tata Pemerintahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa sangat perlu untuk kelancaran monitoring dan evaluasi desa.

Sebelumnya, pada tahun 2022 sub kegiatan ini dihapus karena minimnya anggaran.

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pencapaian Sasaran strategis Kepala Seksi PMD dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap pertama melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan yaitu Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, dengan pagu sebesar Rp 600.000 terealisasi sebesar Rp 600.000 (100%). pelaksanaan digabung dari 3 kecamatan menjadi 1 yang dilaksanakan di kec Jorong (Jorong, Batu Ampar dan Kintap)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (dijabarkan)				Kendala Yang dihadapi	Masukan dan Saran untuk perbaikan	Capaian Kinerja
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			
1	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	4 Kelompok				5	belum adanya forum koordinasi antar kelompok ditingkat kecamatan	Perlu adanya Forum Koordinasi antar kelompok ditingkat kecamatan	5 Kelompok
							Tidak semua informasi yang masuk seperti pembinaan dari dinas teknis masuk ke kecamatan	Perlunya informasi yang diberikan dari kelompok kepada pemerintah atau dari Dinas Teknis ke Pihak Kecamatan	
2	jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	14 Desa					Perubahan Data yang Dinamis	Penghimpun data lebih aktif dalam mengumpulkan perubahan data	
3	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrembang tingkat kecamatan	1 kali							
4	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDESA) yang terbentuk, aktif dan bisa menghasilkan PAD	14 BumDESA	1	2	2	2	Kurang Aktifnya Pengurus dan belum optimalnya BumDESA	Perlu adanya Forum koordinasi BumDESA di Tingkat Kecamatan	7 BumDESA
5	Jumlah kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa	1 Kerjasama				1			1 Kerjasama
6	Jumlah penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah	3 Kali			1	1			2 Kali

	kepada masyarakat lingkup kecamatan							
	KINERJA TAMBAHAN							
1	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	14 Dokumen	3	4	3	4		14 Dokumen

Dalam melaksanakan Tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki kendala sebagai berikut :

1. Kegiatan Musrenbang kecamatan, pelaksanaan digabung dari 3 kecamatan menjadi 1 yang dilaksanakan di kec Batu Ampar (Jorong, Batu Ampar dan Kintap) menyebabkan pelaksanaan tidak efektif, karena 3 kecamatan di gabung menjadi 1 pada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan akan lebih Efektif apabila dilaksanakan di masing masing Kecamatan.
2. Pada Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan, informasi kegiatan yang disetujui dan dilaksanakan pada tahun berjalan belum ada, sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih usulan. Informasi Kegiatan yang telah disetujui di Tahun berjalan sangat penting diinformasikan Saat Musrenbang, agar tidak di usulkan Kembali ke tahun berikutnya.
3. Pada Seksi PMD kecamatan kintap, Kepala Seksi belum memiliki staf yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kurang maksimal. Serta Pengurangan anggaran akibat dialihkan ke percepatan Penanganan covid 19 menyebabkan kegiatan yang seyogianya dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan

4. Perlunya untuk memasukkan **Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan**. Karena salah satu factor pendukung pembangunan di kecamatan kintap adalah pihak swasta / korporasi di wilayah kecamatan. Kecamatan kintap adalah wilayah strategis dimana banyak beroperasi perusahaan pertambangan batubara dan Perkebunan kelapa Sawit. Tumbuh Kembang BumDESA serta BumDesMA serta Posyantek turut menjadi pertimbangan pentingnya anggaran untuk sub kegiatan ini.
5. Sub Kegiatan koordinasi / Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical lain juga sangat perlu ditambahkan pada Rencana Kerja Tahun 2024. **Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi sangat penting untuk sinergitas pembangunan** di wilayah desa dan kecamatan.

3. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Kemasyarakatan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap pertama melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) sub kegiatan yakni Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan sub kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal dengan nilai pagu Rp 1.029.992.634,00

terserap sebesar Rp 879.587.800,00 (85,40%). Sub Kegiatan ini melaksanakan beberapa kegiatan lapangan diantaranya Safari Ramadhan, Kegiatan Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Pembinaan PKK, dan Pemberian Dana Hibah 1 Miliar untuk Kelompok Masyarakat.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (dijabarkan)				Kendala Yang dihadapi	Masukan dan Saran untuk perbaikan	Capaian Kinerja
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Trw 4			
1	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan dan keagamaan	10 Kelompok	Karang Taruna Banua Bersatu Kec Kintap	Karang Taruna Satrian Bina Muda Desa kebun Raya	Karang Taruna Taruna Jaya Desa Kintapura	Karang Taruna Samudra Jaya Muara Kintap	Tidak aktif nya Pengurus Karang Taruna di Beberapa Desa (Desa Pandansari, Salaman, Riam Adungan, Sebamban Baru, Sungai Cuka, Sumber Jaya)	Perlunya dilaksanakan pembinaan berlanjut untuk Temu kader karang taruna (jambore) untuk meningkatkan semangat karang taruna desa yang belum aktif	9 Kelompok
			Lembaga Adat Bandesa Desa Sebamban Baru	Karang Taruna Satria Budi Tama Desa Bukit Mulya	Karang Taruna Desa MeKar Sari	Majelis Ta'lim Perempuan Miftahul Khair Desa Kintapura	Belum ada prioritas anggaran untuk pembinaan Majelis Ta'lim	Perlunya tambahan anggaran untuk pembinaan majelis Ta'lim	
						Majelis Ta'lim Az Zahra Desa Kintapura			
2	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesuai SOP	10 kegiatan	Pameran dan Tabligh Akbar di Desa Kintapura	Turnamen Sepakbola di Desa Kebun Raya	Tabligh Akbar Oleh Yayasan Nurussalam Desa Kintap	Tabligh Akbar oleh Yayasan Miftahul Ulum di Desa Sumber Jaya	Kurang nya motivasi Pengurus lembaga karena kesibukan pekerjaan.	Pemerintah Desa untuk lebih merangkul dan memberikan semangat kepada organisasi / lembaga untuk lebih bersemangat	8 Kegiatan
				Lomba Kuda Lumping Didesa Bukit Mulia	Festival anak sholeh di Desa Kintap				
3	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial (BPNT, Bantuan Pangan Non tunai)	800 Orang	709 Orang	709 Orang	709 Orang	709 Orang	Adanya Perubahan Data Jumlah Penerima karena : Meninggal Dunia, Pindah Alamat ke Kecamatan lain, dan sudah mampu)	Sinkronisasi Data dan Koordinasi dengan Dinas Teknis Terkait lebih ditingkatkan	709 Orang

Pada Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Kecamatan Kintap menghibahkan Dana kegiatan Kepada 8 (Delapan) Badan/ Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan . dari Delapan Lembaga organisasi kemasyarakatan yang akan menerima Hibah tersebut, 2 (dua) kegiatan dari dua Lembaga tidak dapat dilaksanakan karena Dokumen Lembaga yang masih belum dapat dilengkapi oleh Organisasi Kemasyarakatan yang mengusulkan.

Berikut adalah Tabel 8 (Delapan) Badan/ Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan yang menerima Hibah pada Tahun 2022 :

No	Nama Kegiatan	Desa	Jumlah Dana Yang dihibahkan	Pengusul	Keterangan	
1	Lomba Kuda Lumping Se Kabupaten Tanah Laut Karang Taruna Satria Budi Tama	Bukit Mulia	118.400.000	Usulan Masyarakat	Selesai	Dok Lengkap
2	Turnamen Sepak Bola Karang Taruna Sinar Muda	Kebun Raya	75.000.000	Usulan Masyarakat	Selesai	Dok Lengkap
3	Kegiatan Festival Anak Sholeh Indonesia BKPRMI	Kintap	110.000.000	Usulan Masyarakat	Selesai	Dok Lengkap
4	Kegiatan Pameran Dan Tabliq Akbar Karang Taruna Banua Bersatu	Kintap	290.000.000	Usulan Masyarakat	Selesai	Dok Lengkap
5	Tabliq Akbar dalam Rangka Peringatan Isra Mi'raj Yayasan Nurussalam	Kintapura	50.000.000	Usulan Masyarakat	Selesai	Dok Lengkap
6	Kegiatan Festival Seni Dan Budaya Karang Taruna Kesuma	Pandansari	100.000.000	Usulan Masyarakat	Tdk dilaksanakan	Dok tdk Lengkap
7	Kegiatan Tabliq Akbar Yayasan Riyadhul Jannah	Pandansari	50.000.000	Usulan Masyarakat	Tdk dilaksanakan	Dok tdk Lengkap
8	Tabliq Akba Milad Ponpes Yayasan Miftahul Ulum	Sumber Jaya	201.604.000	Usulan Masyarakat	Selesai	Dok Lengkap

Dari hasil evaluasi seksi kemasyarakatan, perlu adanya **penambahan sub kegiatan fasilitasi , koordinasi dan Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional** untuk meningkatkan kinerja di seksi kemasyarakatan.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kasi Trantib pada Tahun 2022 melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia.

Pagu TA 2022 pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kintap sebesar Rp 14.996.200 Terserap sebesar Rp 4.216.000 (28,11 %)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Kendala Yang dihadapi	Masukan dan Saran untuk perbaikan	Capaian Kinerja
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			
1	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dikecamatan yang difasilitasi	20 kali	4	3	4	2	Tidak ada staf dan peralatan kerja yang memadai	Perlu nya tambahan Peralatan Kerja (Laptop) dan Staf Pembantu	13
2	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	14 Kelompok	2	2	2	2	Perlu Kegiatan Pelatihan dan jambore Linmas	Perlu diadakan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Jambore linmas berkelanjutan	8
3	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring	20 Kali	4	4	4	4	Tidak ada staf dan peralatan kerja yang memadai	Perlu nya tambahan Peralatan Kerja (Laptop) dan Staf Pembantu	16
4	jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring	6 Kali	2	1	1	2	Tidak ada staf dan peralatan kerja yang memadai	Perlu nya tambahan Peralatan Kerja (Laptop) dan Staf Pembantu	6

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsinyaa, seksi ketentraman dan ketertiban masih memerlukan **tambahan peralatan kerja dan staf.**

5. Kepala Seksi Pelayanan

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap melalui Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan yaitu kegiatan Implementasi Pelaksanaan *Good Governance*. Adapun untuk capaian Indikator kinerja point 1 sampai dan 2 dapat tercapai sebesar 100%.

Pelayanan Langsung yang dapat dirasakan kurang maksimal adalah belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung Gedung bangunan kantor seperti Gorden, Peralatan mesin seperti Pendingin ruangan untuk Aula dan Ruang kerja. Sehingga apabila Aula dipergunakan suhu cukup panas dan gerah.

Pada tahun 2022, Bangunan Baru Gedung Kantor Kecamatan Kintap baru selesai digunakan dan masih membutuhkan banyak perlengkapan.



Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Bangunan Kantor Yang diperlukan diantaranya Gorden. Selain itu, Perlunya penambahan Peralatan dan Mesin lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan kecamatan kintap antara lain, Ac Standing 3 PK sebanyak 2 Unit untuk Aula, LED Screen untuk Ruang mediasi dan rapat, serta AC 0,5 PK sebanyak 5 unit untuk menunjang kinerja kepala seksi di ruang kerja.

Pada usulan RKBMD (rencana pengadaan barang milik daerah) pada tahun 2024, kecamatan kintap juga mengusulkan Pengadaan alat kerja yaitu Laptop untuk peremajaan Komputer PC yang berusia sudah cukup lama dan tidak bisa di update dengan software terbaru.

Usulan lain dalam rencana kerja 2024 adalah pengadaan Mobil Operasional, dengan spesifikasi Double Cabin (DC) dan 4 x 4 (4 roda penggerak). Sulitnya medan seringkali menjadi kendala dalam verifikasi lahan saat terjadinya mediasi. Masih ada 2 desa yaitu Salaman dan Riam adungan dengan akses tembus yang masih cukup sulit dengan mobil biasa apabila dalam kondisi cuaca hujan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap

Kecamatan Kintap di bentuk melalui peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1980 Tanggal 10 Juli 1980. peraturan Bupati Tanah Laut 51 Tahun 2009 tentang tugas dan fungsi kecamatan di kabupaten Tanah Laut. Tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Kintap adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan program /kegiatan Kantor Kecamatan Kintap tidak lepas dari Program/ Kegiatan yang mendukung visi dan misi Kabupaten Tanah Laut.

Kecamatan Kintap dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Pelayanan yang merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi layanan dan atau penerima layanan, Pelayanan Publik yang diberikan meliputi :

1. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
2. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik/Manual.
3. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga).

4. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
5. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
6. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
8. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
9. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
10. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
13. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah.

Berikut adalah Tabel Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan		Keterangan Pelaksana (2021)
		Tahun 2022	Tahun 2021	
1.	Perekaman KTP	25 Orang	526 Orang	Seksi Pelayanan
2.	Pengantar Perekaman dan Pengambilan KTP	- Surat	526 Surat	Seksi Pelayanan
3.	Penerbitan Kartu Keluarga	- Lembar	526 Lembar	Seksi Pelayanan
4.	Pengantar Surat Keterangan Pindah	- Surat	526 Surat	Seksi Pelayanan
5.	Dispensasi Nikah	81 Surat	103 Surat	Seksi Pelayanan
6.	Rekomendasi	56 Surat	70 Surat	Seksi Pelayanan
Legalisasi				
7.	Surat Keterangan Tidak Mampu	183 Surat	221 Surat	Seksi Pelayanan
8.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	188 Surat	411 Surat	Seksi Pelayanan
10.	Surat Keterangan Usaha / Tempat Usaha	14 Surat	14 Surat	Seksi Pelayanan
11.	Surat Keterangan Domisili	- Surat	- Surat	Data di Desa
12.	Surat Keterangan Ahli Waris	59 Surat	68 Surat	Seksi Pelayanan
13.	Surat Pengantar Ijin Keramaian	- Surat	- Surat	Seksi Pelayanan

14.	Surat Keterangan Kematian	- Surat	- Surat	Data di Desa
15.	Surat Keterangan Lain-lain	61 - Surat	- Surat	Seksi Pelayanan
16.	Surat Keterangan Tanggungan	- Surat	- Surat	Seksi Pelayanan
17.	Legalisasi	48	42	Seksi Pelayanan
18.	Surat Masuk	599	578	Seksi Pelayanan
19.	Surat Keluar	828	792	Seksi Pelayanan
Fasilitasi				
20.	Penyaluran Bansos Provinsi	250 Paket	-	Seksi Kemasy.
21.	Penyaluran Bansos kabupaten (bantuan Kenaikan Inflasi)	478 UMKM dan 485 Orang (Dinsos)	-	Seksi Kemasy.
22.	Penyaluran Rastra / BPNT (12 Bulan)	793 KK	845 KK	Seksi Kemasy.
23.	S. Ket. / Laporan Musibah / Bencana	4 Buah Desa Sungai Cuka	-	Seksi Kemasy.
24.	PKH (Program Keluarga Harapan)	- KK	468 KK	Seksi Kemasy.
25.	PBI / JKN (Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional)	4632 KK	4632 KK	Seksi Kemasy.
26.	KIP (Kartu Indonesia Pintar)	519 KK	522 KK	Seksi Kemasy.
27.	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	2155 KK	2155 KK	Seksi Kemasy.

Tabel Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2022

Selain 13 Pelayanan Dasar, kecamatan kintap pada tahun 2022 juga memfasilitasi beberapa pelayanan lain seperti Penyaluran Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi, Penyaluran Bantuan Sosial Kabupaten (Kenaikan Inflasi), Penyaluran Rastra / BPNT (12 Bulan), pembuatan S. Ket. / Laporan Musibah / Bencana, Penyaluran bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), PBI / JKN (Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional), KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Selain itu, untuk penanganan Konflik sosial masyarakat kecamatan kintap juga melakukan fasilitasi mediasi di masyarakat.

Indikator kinerja pelayanan kantor kecamatan Kintap mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran RPD yang tertuang dalam Renstra PD kantor kecamatan Kintap tahun 2024-2026. indikator yang digunakan merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang memperhatikan pada tugas dan fungsi SKPD sebagai penyelenggara pelayanan.oleh karena itu,kantor kecamatan Kintap telah menyusun IKU berdasarkan pada RPD kabupaten tanah laut yaitu Nilai SAKIP Kabupaten dan Nilai Indeks Pelayanan Publik.

Target Kinerja 2024 – 2026 dapat digambarkan pada Tabel Berikut :

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah SKPD Kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	70.01 (BB)	75.00 (BB)	80.01 (A)
1		Meningkatnya kinerja tata kelola kecamatan kintap yang akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan Kintap	82	83	83
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.		Nilai Indeks Pelayanan Publik	4,54 / A	4,55 / A	4,57 / A
2		Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Kintap	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kintap	90 A (Sangat Baik)	91 A (Sangat Baik)	92 A (Sangat Baik)

Berdasarkan data hasil pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan di kantor kecamatan Kintap pada tahun 2022 adalah 86,28% dari target 88.00%. Survey dilakukan kepada responden/masyarakat yang datang secara langsung ke kantor kecamatan Kintap dengan 100 responden dengan 13 pertanyaan unsur pelayanan.

Dalam mencapai visi dan misi kantor kecamatan Kintap, terdapat tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. di kantor kecamatan Kintap tantangan dan peluang yang di hadapi adalah :

1. Tantangan.

- a. Masyarakat semakin kritis terhadap tuntunan pembangunan yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- b. Informasi yang semakin transparan menuntut peran kecamatan Kintap harus lebih respon terhadap pembangunan masyarakat.
- c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain.
- d. Kecamatan Kintap lebih didominasi sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian diperlukannya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah kecamatan Kintap.

2. Peluang

- a. Adanya peraturan perencanaan yang mendukung.
Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. peraturan tersebut merupakan peluang kecamatan dalam melaksanakan tupoksinya.
- b. Peran perencanaan yang sangat penting.
Fungsi perencanaan menjadi semakin penting agar berbagai aktifitas organisasi memiliki arah dan pedoman yang jelas. demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, kehadiran peran perencanaan yang professional sangat di perlukan.
- c. Dukungan dari SKPD.
Terkait dengan perencanaan daerah dukungan dari SKPD terkait dirasakan relatif tinggi. nampak dari kesediaannya dalam menyediakan data, kehadiran mereka pada rapat-rapat yang dilaksanakan oleh kecamatan Kintap.
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan non formal bagi para pegawai yang ada di kecamatan Kintap.

2.3. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kintap**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Kantor Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya di lingkungan kecamatan;
- b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembaangunan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan;
- c. pembinaan administrasi pemerintahan desa / kelurahan;
- d. pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama;
- e. pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) diwilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi terkait diwilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan;
- h. penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor kecamatan Kintap yaitu:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Jumlah pegawai yang kurang.
- c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi di kecamatan Kintap, diharapkan agar pemerintah kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan Kintap di antaranya adalah :

- a. Diberikannya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Menambah pegawai yang produktif dan berkualitas.
- c. Mengadakan pelatihan dan pengiriman ke diklat tingkat kabupaten.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada kantor kecamatan Kintap telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja kantor. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kantor kecamatan Kintap yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi kantor kecamatan Kintap. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya yang dilaksanakan oleh kantor kecamatan Kintap.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

Program dan kegiatan yang di usulkan oleh masyarakat desa, di usulkan melalui kegiatan musrenbang yang diselenggarakan di kecamatan. sebelumnya desa mengadakan musrenbang desa yang hasilnya akan menjadi usulan masing-masing desa untuk dibawa dalam musrenbang kecamatan.

Hasil musrenbang kecamatan merupakan usulan dari masing-masing desa yang merupakan sesuatu yang mereka perlukan yang akan direalisasikan oleh pemerintah daerah melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung

jawab dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sementara fungsi kecamatan hanya sebagai fasilitasi dan mengkoordinasikan dengan instansi yang terkait.

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 berkaitan dari RPD 2024-2026 yang memiliki 3 (Tiga) Isu strategis yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat secara merata dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja pada Kantor Kecamatan Kintap pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung dari sinergitas dan sinkronisasi kebijakan yang diambil antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang berorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan serta pengembangan program percepatan pengurangan kemiskinan.

Disamping itu hasil-hasil pembangunan harus dapat meningkatkan daya saing daerah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Kintap

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya.

Adapun Tujuan yang akan dicapai Kantor Kecamatan Kintap sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dengan disertai rencana tingkat capaiannya. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang dicapai pada masing-masing tujuan adalah:

1. Meningkatnya kinerja tata kelola kecamatan kintap yang akuntabel
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Kintap

Tujuan, Sasaran dan Indikator nya dapat digambarkan pada table berikut

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten
1		Meningkatnya kinerja tata kelola kecamatan kintap yang akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan Kintap
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.		Nilai Indeks Pelayanan Publik

2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Kintap	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kintap
---	---	---

3.3 Program dan Kegiatan

Sistematis dan terpadu adalah untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan Program sangatlah erat kaitannya dengan kebijakan dari instansinya. Dalam rangka mengimplementasikannya, diperlukan identifikasi keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatannya. Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Kintap, kemudian dijabarkan kedalam program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan.

Adapun program dan kegiatan tahun 2024 adalah :

I. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / kota

Kegiatan dalam program ini diantaranya :

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
2. Administrasi keuangan Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kegiatan dalam program ini diantaranya :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

III. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan dalam program ini diantaranya :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan dalam program ini diantaranya :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

V. Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan dalam program ini diantaranya :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

VI. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan dalam program ini diantaranya :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pada tahun 2024, Kecamatan Kintap Merencanakan dalam rencana kerja awal ini melaksanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan Pagu Awal sebesar Rp 5.950.124.150 yang akan dijabarkan dalam Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2024
Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Lokasi
					2024		
					Target	(Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	-19
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah			Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai			
	Meningkatnya kinerja tata kelola kecamatan kintap yang akuntabel		Nilai SAKIP Kecamatan Kintap	Nilai			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Kintap	Nilai			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen			
		Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	Rp 6.430.141	Kec Kintap
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	Rp 3.475.943	Kec Kintap
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	Rp 2.359.104.776	Kec Kintap
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	19	Rp 3.470.388	Kec Kintap
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen			

		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	22	Rp 22.000.000	Kec Kintap
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	Rp 6.060.019	Kec Kintap
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	Rp 32.459.682	Kec Kintap
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	7	Rp 3.000.000	Kec Kintap
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	Rp 20.000.000	Kec Kintap
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	580	Rp 156.000.000	Kec Kintap
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	Rp 740.000.000	Kec Kintap
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	Rp 10.000.000	Kec Kintap
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	Rp 35.000.000	Kec Kintap
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	Rp 600.000.000	Kec Kintap
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			Kec Kintap
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	Rp 20.000.000	Kec Kintap

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persen			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet	Laporan	12	Rp 2.000.000	Kec Kintap
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	Rp 218.836.074	Kec Kintap
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Unit	1	Rp 33.000.000	Kec Kintap
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara	Unit	5	Rp 60.000.000	Kec Kintap
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	2	Rp 3.000.000	Kec Kintap
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Unit	10	Rp 5.280.000	Kec Kintap
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	2	Rp 20.000.000	Kec Kintap
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.			Nilai Indeks Pelayanan Publik	Nilai			
	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Kintap		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kintap	Nilai			

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan Kintap	Nilai			
		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persen			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	Rp 6.843.500	Kec Kintap
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Kintap	Nilai			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	Rp 4.216.000	Kec Kintap
		PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Kintap	Nilai			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen			

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	500	Rp 99.991.331	Kec Kintap
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	20	Rp 20.000.000	Kec Kintap
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Orang	2000	Rp 1.250.000.000	Kec Kintap
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	Rp 8.741.250	Kec Kintap
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	Rp 70.353.725	Kec Kintap
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Kintap	Nilai			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen			

			Pemerintahan Desa				
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	14	Rp 7.425.000	Kec Kintap
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	Rp 15.372.368	Kec Kintap
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Kintap	Nilai			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen			
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	Rp 6.843.500	Kec Kintap
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	Rp 25.000.000	Kec Kintap

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah SKPD Kecamatan Kintap Untuk Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel berikut :

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2024
Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Pendanaan
					2024		
					Target	(Rp)	
-1	-2	-3	-4	-5	-10	-11	-19
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai			
	Meningkatnya kinerja tata kelola kecamatan kintap yang akuntabel		Nilai SAKIP Kecamatan Kintap	Nilai			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Sekretariat Kecamatan Kintap	Nilai			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen			
		Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	Rp 6.430.141	PAD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	Rp 3.475.943	PAD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	Rp 2.359.104.776	DAU
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	19	Rp 3.470.388	PAD

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	22	Rp 22.000.000	PAD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	Rp 6.060.019	PAD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	Rp 32.459.682	PAD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	7	Rp 3.000.000	PAD
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	Rp 20.000.000	PAD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	580	Rp 156.000.000	PAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	Rp 740.000.000	PAD
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	Rp 10.000.000	PAD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	Rp 35.000.000	PAD
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	Rp 600.000.000	PAD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			PAD

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	Rp 20.000.000	PAD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Rp 2.000.000	PAD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet	Laporan	12	Rp 46.220.453	PAD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	Rp 218.836.074	PAD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Unit	1	Rp 33.000.000	PAD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara	Unit	5	Rp 60.000.000	PAD
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	2	Rp 3.000.000	PAD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Unit	10	Rp 5.280.000	PAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	2	Rp 20.000.000	PAD
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah.			Nilai Indeks Pelayanan Publik	Nilai			

	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada Kecamatan Kintap		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kintap	Nilai			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM Kecamatan Kintap	Nilai			
		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Persen			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	Rp 6.843.500	PAD
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Kintap	Nilai			
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	Rp 4.216.000	PAD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai IKM Kecamatan Kintap	Nilai			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen			

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	500	Rp 99.991.331	PAD
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	20	Rp 20.000.000	PAD
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Orang	2000	Rp 1.250.000.000	PAD
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	Rp 8.741.250	PAD
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12	Rp 70.353.725	PAD
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai IKM Kecamatan Kintap	Nilai			
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen			
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset	Dokumen	14	Rp 7.425.000	PAD

			desa				
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	Rp 15.372.368	PAD
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA DAN KELURAHAN	Nilai IKM Kecamatan Kintap	Nilai			
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen			
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	Rp 6.843.500	PAD
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	Rp 25.000.000	PAD

Pada tahun 2024, Kecamatan Kintap Merencanakan dalam rencana kerja awal ini melaksanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan Pagu Awal sebesar Rp 5.950.124.150.

Sumber Pendanaan terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Kantor Kecamatan Kintap tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah laut tahun 2024-2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Kantor Kecamatan Kintap ini merupakan perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024 dibuat dalam rangka mengakomodir permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi Kantor Kecamatan Kintap.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Kantor Kecamatan Kintap Penetapan Prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan SKPD yang membidangi tugas dan fungsinya.

Kintap, 24 Januari 2023

Camat Kintap,

Sutarno, S.Kep.Ns, MM
NIP. 19731006 199602 1 001

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2022
TRIWULAN IV
Kintap

P

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RP.UMD	Realisasi Capaian Kinerja RP/UMD sampai dengan RKPD Tahun 2021 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP/UMD s/d Tahun 2022/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP/UMD s/d tahun 2022 (%)	
					6		7		8		9		10		11		12		13=12/x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.902.397.092	468.001.828	684.625.807	459.444.201	653.760.887	2.265.832.723	78,07%	2.265.832.723	0,00%	0,00%							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun (Dokumen)	0,00	0,00	1	8.888.000	673.100	3.063.600	-	-	1.208.200	4.944.900	0,00%	55,64%	0,00	4.944.900	0,00%	0,00%					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.774.000	673.100	1.096.800	-	-	-	1.769.900	46,90%	1.769.900	0,00%	0,00%							
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.114.000	-	1.966.800	-	-	1.208.200	3.175.000	62,08%	3.175.000	0,00%	0,00%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	0,00	0,00	0	2.370.722.270	375.580.313	587.826.193	346.241.864	480.622.181	1.790.270.551	0,00%	75,52%	0,00	1.790.270.551	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.365.458.270	375.580.313	587.082.593	345.247.864	477.595.781	1.785.506.551	75,48%	1.785.506.551	0,00%	0,00%								
		Pelaksanaan Pembalokan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD					5.264.000	-	743.600	994.000	3.026.400	4.764.000	90,50%	4.764.000	0,00%	0,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	0,00	0,00	0	131.518.006	18.315.000	12.476.000	37.349.470	49.377.510	117.517.980	0,00%	89,36%	0,00	117.517.980	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7.972.662	-	970.000	3.497.000	513.000	4.980.000	62,46%	4.980.000	0,00%	0,00%								
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					49.195.208	12.315.000	3.306.000	14.382.000	14.917.305	44.920.305	91,31%	44.920.305	0,00%	0,00%								
		Penyediaan Barang Colakan dan Pengondisian					4.650.136	-	-	1.895.000	590.000	2.485.000	53,44%	2.485.000	0,00%	0,00%								
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					69.700.000	6.000.000	8.200.000	17.575.470	33.357.205	65.132.675	93,45%	65.132.675	0,00%	0,00%								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25.609.721	-	-	-	24.400.000	24.400.000	95,28%	24.400.000	0,00%	0,00%								
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.609.721	-	-	-	24.400.000	24.400.000	95,28%	24.400.000	0,00%	0,00%								
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* (%)	0,00	0,00	0	285.974.895	60.860.415	62.163.514	60.095.296	74.125.256	257.244.481	0,00%	89,95%	0,00	257.244.481	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					44.608.935	6.151.395	7.454.494	5.478.618	19.323.900	38.408.407	86,10%	38.408.407	0,00%	0,00%								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					241.365.960	54.709.020	54.709.020	54.616.678	54.801.356	218.836.074	90,67%	218.836.074	0,00%	0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Mlik Daerah yang Dipelihara (Jenis)	0,00	0,00	6	79.684.200	12.573.000	19.096.500	15.757.571	24.027.740	71.454.811	0,00%	89,67%	0,00	71.454.811	0,00%	0,00%						
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					11.000.000	-	4.496.000	3.884.500	1.923.500	10.304.000	93,67%	10.304.000	0,00%	0,00%								
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					55.000.000	12.573.000	12.900.500	10.823.071	18.514.240	54.810.811	99,66%	54.810.811	0,00%	0,00%								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					13.684.200	-	1.700.000	1.050.000	3.590.000	6.340.000	46,33%	6.340.000	0,00%	0,00%								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0,00%	78,07%									
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Tinggi									
KECAMATAN																								
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					14.996.200	-	3.390.000	-	-	826.000	4.216.000	28,11%	4.216.000	0,00%	0,00%							

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah SKPD Kecamatan Kintap
Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian Indikator	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Hasil Survey (%)	Indeks Kepuasan Masyarakat		83 %	85%	87%	88%	89%		79,33%	85,64%	86,28%			93,93%	98,43%	98,05%		

Keterangan :
 Data 2019 Tidak Lengkap

Kintap, 30 Desember 2022



Tabel T-C.24.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah SKPD Kecamatan Kintap
 Kabupaten Tanah Laut

Uraian Struktur Belanja	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Operasi	Rp 3.248.288.606	Rp 2.839.371.566	Rp 3.660.893.495	Rp 3.939.865.127	Rp 4.957.639.051	Rp 2.318.726.698	Rp 1.948.352.139	Rp 2.776.267.144	Rp 3.145.700.360		71,38%	68,62%	75,84%	79,84%			
Belanja Pegawai	Rp 2.380.069.446	Rp 2.305.398.116	Rp 2.438.262.971	Rp 2.365.458.270	Rp 1.965.920.647	Rp 1.511.394.172	Rp 1.497.316.758	Rp 1.725.482.364	Rp 1.785.506.551		63,50%	64,95%	70,77%	75,48%			
Belanja Barang dan Jasa	Rp 868.219.160	Rp 533.973.450	Rp 737.630.524	Rp 579.402.857	Rp 2.149.138.404	Rp 807.332.526	Rp 451.035.381	Rp 566.484.780	Rp 515.189.809		92,99%	84,47%	76,80%	88,92%			
Belanja Hibah			Rp 485.000.000	Rp 995.004.000	Rp 842.580.000	Rp -	Rp -	Rp 484.300.000	Rp 845.004.000				99,86%	84,92%			
Belanja Modal	Rp 46.070.000	Rp -	Rp 71.089.150	Rp 25.120.799	Rp -	Rp 44.121.000	Rp -	Rp 65.338.364	Rp 24.050.000		95,77%		91,91%	95,74%			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 46.070.000	Rp -	Rp 71.089.150	Rp 25.120.799	Rp -	Rp 44.121.000	Rp -	Rp 65.338.364	Rp 24.050.000		95,77%		91,91%	95,74%			
Total Belanja			Rp 3.731.982.645	Rp 3.964.985.926		Rp 2.362.847.698	Rp 1.948.352.139	Rp 2.841.605.508	Rp 3.169.750.360								

Keterangan :
 Sumber Data dari LRA

Kintap, 30 Desember 2022



